

ABSTRAK

RAIHAN ANUGERAH. 1223040106. ANALISIS KOMPARATIF SANKSI ZINA MUHSAN DALAM PASAL 33 QANUN JINAYAT ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DAN PASAL 225 QANUN MOJAZAT ISLAMI IRAN TAHUN 2013.

Hukum pidana Islam mengenai *zina muhsan* di era modern menunjukkan variasi penerapan yang signifikan antar wilayah yurisdiksi. Aceh dan Iran, meskipun sama-sama berlandaskan syariat Islam, memiliki pendekatan politik hukum yang berbeda dalam mentransformasikan teks keagamaan menjadi hukum positif. Perbedaan ini dipicu oleh dialektika antara nilai-nilai tradisional keagamaan dengan tuntutan sistem hukum nasional serta konteks sosiopolitik global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi zina muhsan yang diatur dalam pasal 33 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 225 Qanun Mojazat Islami Iran Tahun 2013. Serta menganalisis perbandingan sanksi hukum zina muhsan pada Qanun Jinayat Aceh dan Qanun Mojazat Islami Iran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan landasan filosofis dari teori utilitarianisme karya Jeremy Bentham dan landasan sosiologis dari teori efektivitas hukum karya Soerjono Soekanto. Serta teori perbandingan hukum sebagai alat utama menjawab masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam formulasi sanksi. Di Aceh, sanksi bagi pelaku *zina muhsan* berupa 100 kali cambuk, yang mencerminkan ijtihad moderat demi menjaga harmonisasi dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, Iran menetapkan rajam sebagai sanksi utama, namun memberikan ruang diskresi bagi otoritas kehakiman untuk mensubstitusinya menjadi pidana gantung atau cambuk. Perbedaan ini bermuara pada paradigma politik hukum dan orientasi kemanfaatan; Aceh mengedepankan integrasi nasional, sedangkan Iran lebih menekankan pada purifikasi ideologi agama. Meskipun demikian, kedua yurisdiksi pada hakikatnya memiliki visi yang sama, yakni mewujudkan *maqashid syariah* dalam bentuk perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dengan metode yang dikalibrasi sesuai realitas sosiopolitik masing-masing negara.

Kata Kunci: *Zina Muhsan, Qanun Jinayat, Qanun Mojazat Islami Iran, Perbandingan Hukum.*

ABSTRACT

RAIHAN ANUGERAH. 1223040106. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SANCTIONS FOR ZINA MUHSAN UNDER ARTICLE 33 OF ACEH JINAYAT QANUN NO. 6/2014 AND ARTICLE 225 OF THE ISLAMIC PENAL CODE OF IRAN 2013.

Islamic criminal law concerning *zina muhsan* (adultery) in the modern era demonstrates significant variations in implementation across different jurisdictions. Aceh and Iran, despite both being anchored in Islamic sharia, possess distinct legal-political approaches in transforming religious texts into positive law. This divergence is triggered by the dialectic between traditional religious values and the demands of national legal systems, alongside the global socio-political context.

This study aims to investigate the sanctions for **zina muhsan** stipulated in Article 33 of the Aceh Qanun Jinayat Number 6 of 2014 and Article 225 of the Islamic Penal Code of Iran of 2013, and to provide a comparative analysis of these legal sanctions across both jurisdictions

This research is a normative legal study (*doctrinal legal research*) utilizing a descriptive-analytical method. The approaches employed encompass the statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The collection of primary, secondary, and tertiary legal materials was conducted through library research.

The data were subsequently analyzed utilizing the philosophical framework of Jeremy Bentham's utilitarianism theory and the sociological framework of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, alongside comparative law theory as the primary analytical tool.

The findings indicate a fundamental difference in the formulation of sanctions. In Aceh, the sanction for *zina muhsan* offenders is 100 lashes, reflecting a moderate *ijtihad* (independent reasoning) to maintain harmonization with the Indonesian national legal framework. Conversely, Iran establishes stoning (*rajam*) as the primary sanction, yet provides discretionary room for judicial authorities to substitute it with hanging or flogging. This distinction stems from their respective legal-political paradigms and utility orientations; Aceh prioritizes national integration, whereas Iran places greater emphasis on the purification of religious ideology. Nevertheless, both jurisdictions essentially share an identical vision, namely actualizing *maqashid syariah* (the ultimate objectives of Islamic law) in the form of protecting lineage (*hifzh al-nasl*), employing methods meticulously calibrated to the socio-political realities of their respective nations.

Keywords: *Zina Muhsan, Qanun Jinayat Aceh, Islamic Penal Code of Iran, Comparative Law.*